BAB V

KESIMPULAN

Sejak awal berdirinya Australia sebagai negara federasi koloni pada tahun 1901 sampai dengan tahun 1942, politik luar negeri Australia masih menjadi bagian dari kebijakan luar negeri Inggris. Hingga segala kepentingan luar negeri Australia saat itu diwakili dan difasilitasi oleh Inggris. Duta besar Inggris yang bertugas tidak hanya mewakili negaranya namun juga berperan mewakili Australia. (Hamid, Sistem Politik Australia, 1999)

Agar lebih mudah dalam memahami perkembangan politik luar negeri Australia sejak awal berdirinya federasi, perkembangan politik luar negeri Australia dibagi ke dalam 3 fase (Siboro, 2012), yaitu; Sebelum Perang Dunia I, Antara Perang Dunia II dan II, serta Sesudah Perang Dunia II.

Australia di masa kepemimpinan John Howard berusaha untuk mengembangkan pertahanan keamanannya. Ancaman yang dianggap membahayakan untuk Australia saat itu berasal dari utara. Australia rawan menerima ancaman dari utara. Hal ini membuat Australia harus menjalin hubungan yang baik dengan negara tetangganya, terutama Indonesia yang merupakan salah satu negara tetangga terdekat Australia. Pada saat kepemimpinan Paul Keating hubungan Indonesia dengan Australia tampak harmonis, namun ketika John Howard menjadi Perdana Menteri Australia hubungan ini mulai renggang karena Australia mengakui kemerdekaan Timor Timur.

John Howard mencoba membangun kapasitas kompetensi perdagangan dan investasi skala internasional dengan penekanan pada pasar Asia – Pasifik, dapat dijelaskan bahwa pandangan politik luar negeri Australia masa kepemimpinan Howard cenderung mengedepankan pihak swasta sebagai kekuatan terdepan dalam diplomasi internasionalnya. Australia dalam penampilan wajah di dunia internasional memperlihatkan dirinya sebagai wakil kepentingan kolonialisme baru di belahan Asia Tenggara. Salah satu ciri demokrasi di Australia adalah memisahkan antara apa yang menjadi kawasan swasta dari kawasan pemerintah. Wajah politik luar negeri Australia dapat sama sekali berbeda dengan wajah politik swastanya. Dengan dalih swasta, pemerintah Australia dapat melepaskan diri dari tuduhan merongrong negara lain. Peran swasta menjadi garda depan diplomasi yang sangat efektif untuk memperjuangkan agenda-agenda politik sebuah negara (Tangkisan Letug, 2002). Melalui peran pihak swasta inilah Australia berupaya mengembangkan dirinya sebagai investor dan pelaku perdagangan skala dunia. Tidak dapat dipungkiri bahwa pada saat ini Australia menjadi negara salah satu negara terkaya di dunia.

Australia merupakan salah satu negara yang terletak di Samudera Hindia. Samudera terbesar ketiga di dunia. Samudera Hindia memiliki peran penting dalam jalur perdagangan dunia. Selain itu banyak sumber daya alam yang terkandung di dalamnya diantaranya 60% minyak dunia terdapat di Samudera Hindia. Potensi perikanan juga sangat melimpah yang kemudian memberikan keuntungan yang banyak bagi negara – negara yang berada di kawasan tersebut. Keindahan alam yang ada di Samudera Hindia pun dapat dimanfaatkan dalam sektor pariwisata. Tidak hanyak hanya sumber daya alam yang melimpah, tetapi

Smudera Hindia pun memiliki sumber daya manusia yang memadai. Banyaknya potensi yang ada tentunya menjadikan tantangan bagi negara – negara di kawasan Samudera Hindia untuk mengelolanya. Walaupun berbagi lautan yang sama, negara – negara di Samudera Hindia menunjukkan perbedaan yang sangat kontras antara satu dengan yang lainnya. Pada tahun 2011, menurut Human Development Index (HDI) yang dirumuskan oleh United Nations Development Program (UNDP), Australia berada pada urutan kedua dari seluruh dunia, sedangkan Mozambik berada pada urutan empat terakhir, yaitu urutan 184. Secara keseluruhan, rata - rata HDI negara - negara di Samudera Hindia hanya 0,597 di mana rata -rata HDI dunia adalah 0,682. 13 negara Samudera Hindia berada di kategori perkembangan manusia rendah dan 6 negara berada di kategori perkembangan manusia yang sangat tinggi. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu alasan bagi negara – negara kawasan Samudera Hindia untuk menjalin kerjasama regional. Hingga terbentuklah *Indian Ocean Rim Association* (IORA) pada tahun 1997 di Mauritius.

Keputusan Australia untuk ikut mendirikan IORA bersama dengan India, Kenya, Mauritius, Oman, Singapura dan Afrika Selatan merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh John Howard sebagai Perdana Menteri. Kebijakan luar negeri suatu negara pada umumnya merupakan hasil dari serangkaian keputusan yang berkaitan dengan fenomena antar bangsa. Biasanya kebijakan tersebut dikeluarkan oleh negara tertentu untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dengan negara lain. Kebijakan Luar Negeri tersebut dipengaruhi oleh tiga hal yaitu keadaan dalam negeri, kondisi ekonomi militer dan dari segi konteks internasional.

Pengaruh dari kondisi dalam negeri Australia dalam pengamnilan keputusan luar negeri datang dari partai politik terutama partai politik dari Perdana Menteri yang menjabat saat itu. John Howard merupakan Perdana Menteri yang saat itu menjabat dan berasal dari Partai Liberal. Partai ini mementingkan kerjasama di wilayah regional sehingga ini mendukung dari kebijakan John Howard untuk menjalin kerjasama dengan negara – negara kawasan Samudera Hindia. Pertumbuhan ekonomi Australia yang terus meningkat membuat Australia meningkatkan pembelanjaan pertahanannya. Selain itu perekonomian Australia juga bergantung pada perdagangan internasional sehingga ini mendorong Autralia untuk ikut membangun kerjasama regional di Samudera Hindia. Dalam konteks internasional elemen yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Australia yaitu geografis. Australia yang berada di kawasan Samudera Hindia didorong oleh negara – negara tetenagganya di kawasan tersebut untuk menjalin kerjasama.